

DISKUSI, KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Diskusi Hasil Penelitian

Pada bagian ini, mendiskusikan hasil penelitian yaitu membuktikan; partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional, dan membuktikan hipotesis-hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ketua Pos KB Desa atau responden dalam penelitian ini, sebagai tenaga sukarela dalam pelaksanaan program KB Nasional. Ternyata telah berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya. Tugas-tugas tersebut secara rinci, jumlah/persentase yang mengerjakannya adalah sebagai berikut: (1) melaksanakan penerangan dan motivasi (66%), (2) mengerjakan pembinaan peserta KB Nasional (60%), (3) mengerjakan pembinaan Institusi Masyarakat (53%), (4) mengerjakan pendataan PUS dan peserta KB (65%), (5) mengikuti/melaksanakan Rapat Koordinasi KB Desa (61%), (6) mengikuti Minilokakarya KB/Kes (61%), dan (7) membantu kegiatan Posyandu (54%).

Partisipasi dalam kegiatan program KB Nasional di atas ternyata bervariasi. Kenyataan bervariasinya partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, karena disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kemauannya. Partisipasi itu sendiri sebagaimana dikatakan Madrie (1986), memiliki kemauan, kemampuan dan memiliki ambisi untuk mencapai tujuan.

Kemampuan dan kemauan serta ambisi pada setiap orang berbeda-beda.

Tentu saja dengan kenyataan itu, masih belum mencapai harapan pemerintah, dalam hal ini BKKBN. Di mana setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para Ketua Pos KB Desa harus mendapatkan perhatian dan partisipasi yang sama. Tugas-tugas tersebut satu sama lain saling terkait dan saling menunjang, sehingga bila salah satu jenis/aspek tidak dikerjakan maka akan mempengaruhi jenis kegiatan yang sama.

Dari 100 orang Ketua Pos KB Desa (sampel dalam penelitian ini), yang sesuai dengan harapan dalam melaksanakan kegiatannya dalam program KB Nasional. Maksudnya yang mengerjakan paling sedikit 5 kegiatan di mana di dalamnya termasuk pembinaan peserta KB, pembinaan Institusi Masyarakat, dan mengikuti Minilokakarya KB/Kes, ternyata hanya 21%. Sedangkan yang lainnya, sekalipun diantaranya lebih dari 5 kegiatan, namun belum memenuhi harapan seperti di atas. Belum memenuhi harapan tersebut diduga, masih kurang rasa tanggung jawab dan kesadarannya terhadap program KB Nasional. Dikatakan oleh S. Sastropoetro (1988), bahwa salah satu syarat partisipasi harus adanya kesadaran dan tanggung jawab. Kemungkinan lain, adalah pertama, bahwa kegiatan mereka disesuaikan dengan kondisi daerahnya, ke dua, keterbatasan kemampuan dalam mengerjakan jenis-jenis kegiatan di atas, ke tiga, kurang mengikuti pembinaan dari para petugas KB (PLKB/PPLKB, petugas medis), ke empat, petugas KB itu sendiri tidak/kurang membinanya, ke lima,

kurang mengikuti perkembangan program KB Nasional, ke e-nam, asal bekerja saja atau hanya ikut-ikutan. Dari kemungkinan-kemungkinan di atas, karena di samping kemauan dan kemampuannya serta kesadaran dalam dirinya, juga bentuk-bentuk partisipasi yang satu sama lain tentunya berbeda-beda. Bentuk-bentuk tersebut, seperti; partisipasi buah pikiran, harta benda, kemahiran dan partisipasi sosial (Santoso S. Hamijoyo : 1974). Oleh karena itu nampaknya mungkin sekali ada yang sesuai harapan dan ada pula yang belum sesuai harapan.

Bila dilihat dari responden yang berhasil atau yang sesuai harapan (khusus terhadap 2 orang responden). Bahwa Ketua Pos KB Desa tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya sekalipun tidak mengerjakan semua aspek kegiatan yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti; PKK, Kesehatan Lingkungan, UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga), pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Forum-forum yang digunakan, meliputi; pertemuan ibu-ibu/arisan, pengajian, Posyandu, TKBK (Team KB Keliling), ataupun Safari KB. Sasarannya hanya terbatas pada calon peserta dan peserta KB, artinya hanya Pasangan-pasangan Usia Subur (PUS).

Pelaksanaan tugas-tugas tersebut, telah memperlihatkan upaya untuk pembudayaan program KB Nasional di masyarakat. Sekalipun intensitas maupun Sasarannya terbatas pada Pasangan Usia Subur (PUS). Sasaran non PUS, seperti Generasi Muda masih belum mendapat perhatian Ketua Pos KB Desa. Padahal sesuai dengan perkembangannya program KB Na-

sional, telah menginjak pada upaya pelembagaan dan kebudayaan program KB Nasional kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya generasi muda sebagai penunjang keberhasilan program, melalui penundaan usia perkawinan. Belum menjadi perhatiannya Ketua Pos KB Desa, karena terbatasnya kemampuan yang dimilikinya.

Di samping itu secara lebih jauh, bila dilihat dari upaya Ketua Pos KB Desa dalam membina peserta KB Nasional, belum banyak mengungkapkan upaya-upaya menuju kemandirian dalam ber KB. Sehingga timbul dari peserta/masyarakat suatu persepsi yang salah, yaitu dengan KB mandiri, "masyarakat harus bayar". Padahal menurut pengertiannya, KB Mandiri adalah, pelaksanaan KB oleh seorang atau kelompok/ organisasi di mana si pelaksana tidak tergantung kepada orang lain atau pihak lain (Sumarsono ; 1987 : 8). Berdasarkan pengertian itu bahwa persepsi masyarakat yang dihadapinya, nampaknya terlalu sempit dan fisik saja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya, adalah motif berprestasi, komunikasi dan status sosial ekonomi. Sekaitan dengan ini, terdapat tiga hipotesis makro dan masing-masing mempunyai tujuh sub hipotesis. Hal tersebut untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh variabel tersebut terhadap partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Hipotesis pertama, telah terbukti terdapat hubungan yang signifikan ($P > 0,05$) antara motif berprestasi dengan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional. Derajat hubungan (Yule's $Q = 0,69$), yaitu hubungan

positip yang mantap. Dengan demikian bahwa motif berprestasi mempunyai pengaruh terhadap Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional. Terjadinya perubahan positip dari motif berprestasi, maka akan diikuti perubahan positip pula oleh Ketua Pos KB Desa, dalam melaksanakan tugasnya. Diterimanya hipotesis tersebut, hal ini telah diduga sebelumnya, karena Ketua Pos KB Desa merupakan orang pilihan di desanya, yang mempunyai rasa kebanggaan untuk berpartisipasi dalam setiap program pembangunan. Sebagai salah seorang tokoh masyarakat yang dikenal dan sering berkecimpung dalam setiap kegiatan di desanya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ibu-ibu. Sehingga dengan kepercayaan ini, mereka tidak menyalahkannya sekalipun tanpa pamrih. Nampaknya bagi mereka yang penting kepuasan bathinnya. Seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan itu bukan untuk memperoleh suatu pengakuan, melainkan karena tuntutan hati nuraninya (McClelland : 1961). Hal inipun sejalan dengan beberapa syarat dalam pemilihan Ketua Pos KB Desa yang telah ditentukan BKKBN, yaitu : bisa baca tulis, peserta KB aktif, mau sukarela, tanpa pamrih, selalu ambil bagian dalam setiap kegiatan di desa, dan dikenal masyarakatnya. Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya lebih terfokus pada kegiatan pembinaan peserta KB. Hal ini nampak dari tujuh sub hipotesis hanya pembinaan peserta KB yang mempunyai atau yang terpengaruh oleh motif berprestasinya (signifikan $P > 0,05$). Dengan derajat hubungannya (Yule's $Q = 0,59$) hubungan positip yang mantap.

Terbuktinya sub hipotesis ini sejalan pula dengan kegiatan dewasa ini lebih banyak ditekankan pada upaya pembinaan, yaitu untuk lebih memantapkan peserta KB. Sedangkan sub hipotesis yang lainnya, seperti hubungan motif berprestasi dengan penerangan motivasi, dengan pembinaan Institusi Masyarakat, dengan pendataan PUS dan peserta KB, dengan mengikuti Rakor KB Desa, dengan mengikuti Minilokakarya KB/Kes, dan hubungannya dengan membantu kegiatan Posyandu, ternyata ditolak atau tidak signifikan. Hal tersebut di duga, kemungkinan Ketua Pos KB Desa dalam mengerjakan tugasnya hanya memilih pekerjaan yang dianggap penting saja. Kedua, karena keterbatasan kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan atau jenis kegiatan yang lain. Ketiga, kurang mendapat petunjuk atau bimbingan dari petugas KB (PLKB/PPLKB).

Hipotesis kedua, telah terbukti yaitu terdapat hubungan yang signifikan ($P > 0,05$) antara komunikasi dengan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional. Derajat hubungannya (Yule's $Q = 0,52$), mempunyai hubungan positif yang mantap. Terjadinya perubahan positif pada komunikasi/informasi yang diperolehnya, akan diikuti positif pula oleh Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya. Diterimanya hipotesis ini, sejalan dengan anggapan bahwa semakin banyak menerima informasi (dengan membaca, mendengar, dan melihat), maka semakin bertambah pengetahuannya, dan semakin banyak peluang untuk menginformasikan kepada orang lain. Karenanya informasi apapun untuk kemajuan desanya, maka harus diraihinya. "Salah satu syarat yang

harus dituntut bagi seorang komunikator adalah mempunyai pengetahuan yang luas." (Widjaja ; 1986 : 12). Ketua Pos KB Desa nampaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, untuk senantiasa berupaya mencari informasi khususnya perkembangan program KB Nasional. Pengaruh komunikasi terhadap Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya, ternyata hanya terfokus pada kegiatannya dalam penerangan dan motivasi, dan pembinaan peserta KB. Hal tersebut terbukti dari tujuh sub hipotesisnya, hanya dua sub hipotesis yang diterima. Sub hipotesis tersebut, hubungan komunikasi dengan penerangan dan motivasi, hubungan komunikasi dengan pembinaan peserta KB. Hubungan tersebut signifikan ($P > 0,05$), dengan derajat hubungannya masing-masing (Yule's $Q = 0,63$ dan $0,66$), yaitu hubungan positif yang mantap. Dengan demikian kepemilikan informasi lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga Ketua Pos KB Desa nampaknya mempunyai keyakinan, bahwa "dengan informasi pula orang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hidupnya." (Rachmadi; 1988 : 11). Sub-sub hipotesis lainnya, menunjukkan tidak ada hubungan atau tidak signifikan, yaitu hubungan komunikasi dengan pendataan PUS dan peserta KB, dengan pembinaan Institusi Masyarakat, dengan keikutsertaan dalam Rakor KB Desa, dengan Minilokakarya KB/Kes dan hubungan komunikasi dengan membantu kegiatan Posyandu. Ke semuanya adalah ditolak, hal tersebut kemungkinan; pertama, bahwa penggunaan informasi saat ini bagi Ketua Pos KB Desa hanya untuk

keperluan penerangan dan pembinaan saja, sedangkan yang lainnya kurang mendapat perhatian. Kedua, Keterbatasan kemampuan atau kesempatan/waktu untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ketiga, Upaya yang bersangkutan untuk memperoleh informasi, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek kegiatan, masih kurang. Keempat, kurang memperoleh bimbingan atau arahan dari para PLKB/PPLKB.

Hipotesis ketiga, telah terbukti yaitu terdapat hubungan yang signifikan ($P > 0,05$) antara status sosial ekonomi dengan Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional. Derajat hubungannya menunjukkan hubungan positif yang kuat, yaitu Yule's $Q = 0,78$. Terjadinya perubahan ke arah positif dari status sosial ekonomi, maka akan diikuti oleh perubahan positif dari Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional. Diterimanya hipotesis ini sejalan dengan pendapat Keith Davis (1981), peranan seseorang dalam kelompoknya ditentukan oleh keadaan status sosial ekonominya. Teori Rogers, mengatakan pula, bahwa golongan yang status sosial ekonominya tinggi cenderung dapat menerima inovasi sehingga motivasinya lebih tinggi dari pada yang status sosial ekonominya lemah. Hal ini sejalan pula dengan kebijaksanaan BKKBN Propinsi Jawa Barat, bahwa salah satu untuk memilih/menunjuk Ketua Pos KB Desa adalah yang tidak berorientasi pada upah. Hal tersebut karena insentif untuk Ketua-ketua Pos KB Desa hanya sebesar Rp.1.800,- per bulan perorang. Tiga sub hipotesis dari hipotesis

di atas yaitu hubungan status sosial ekonomi dengan kegiatan penerangan dan motivasi, hubungan status sosial ekonomi dengan pembinaan peserta KB, dan hubungan status sosial ekonomi dengan mengikuti Minilokakarya KB/Kes, ternyata diterima. Artinya hubungannya signifikan ($P > 0,05$), dengan derajat hubungan (Yule's Q masing-masing, 0,65; 0,51; dan 0,67), yaitu hubungan positif yang mantap. Jadi semakin tinggi status sosial ekonomi Ketua Pos KB Desa, maka semakin tinggi pula kegiatan dalam penerangan motivasi, pembinaan peserta KB dan mengikuti Minilokakarya KB/Kes. Diterimanya ke tiga sub hipotesis tersebut, di samping menurut informasi para petugas KB bahwa, Ketua Pos KB Desa pada umumnya mempunyai status sosial ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya di desa. Bahwa partisipasi para Ketua Pos KB Desa sedang digalakkan sehubungan dengan keadaan peserta KB yang sudah tinggi, sehingga harus dibarengi dengan upaya pembinaan, penyuluhan dan pembinaan Ketua Pos KB Desa sendiri dalam forum Minilokakarya KB/Kes. Sub hipotesis lainnya, seperti hubungan status sosial ekonomi dengan pembinaan Institusi Masyarakat, dengan pendataan PUS, dengan Rakor KB Desa, dan dengan bantuan terhadap Posyandu adalah mempunyai hubungan yang tidak signifikan yaitu sub hipotesis di atas ditolak. Kemungkinan ditolaknya, pertama, bahwa keterbatasan Ketua Pos KB Desa sendiri untuk melaksanakan semua jenis-jenis kegiatan. Kedua, masih terdapat Ketua Pos KB Desa yang menuntut upah dari pemerintah atau desanya. Ketiga, ter-

dapat Ketua Pos KB Desa yang bekerjanya terpaksa karena ajakan suami atau petugas KB.

Berdasarkan uraian di atas, yang memperlihatkan partisipasi yang rendah. Dengan gejala yang nampak tersebut, memperlihatkan bahwa Pos KB Desa sebagai suatu organisasi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pos KB Desa sebagai suatu organisasi, seharusnya mempunyai fungsi mengelola program KB Nasional, sebagai manifestasi dari alih kelola program dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan yang baru dilaksanakan hanya kegiatan-kegiatan seorang petugas sukarela yang belum mencerminkan suatu organisasi yang tumbuh di masyarakat. Maka untuk meningkatkan fungsi Pos KB Desa sebagai suatu organisasi, sehingga Pos KB Desa diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu organisasi kemasyarakatan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa Pos KB Desa harus dapat memiliki kepengurusan lengkap dengan mekanisme kerja yang teratur. Kepengurusan yang lengkap mempunyai arti adanya keseimbangan tenaga pelaksana dengan beban kerja yang ditangani. Mekanisme kerja yang teratur mempunyai arti adanya suatu pembagian kerja yang tepat dan kerjasama yang baik diantara pengurusnya. Hal tersebut dapat dicapai bila terdapat upaya petugas KB (PLKB) untuk membinanya.

Pendidikan Luar Sekolah sebagai salah satu upaya untuk membelajarkan masyarakat, dari berbagai pengetahuan dan ketrampilan baik dalam bentuk organisasi maupun sebagai anggota organisasi dan masyarakat. Oleh karena dapat dimanfaatkan oleh PLKB dengan menggunakan

forum-forum atau wadah-wadah yang tersedia di masyarakat. Kegiatan belajar ini meliputi aspek ; (1) pengetahuan dan ketrampilan baik yang menyangkut organisasi dan manajemen maupun dibidang kegiatan operasional. (2) Keorganisasian, yang menyangkut kepengurusan dan pembagian kerja. (3) Aspek keswadayaan, yang menyangkut kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk mengadakan dana, kemampuan untuk monitoring dan kemampuan untuk evaluasi.

Kegiatan belajar selanjutnya lebih ditekankan kepada pengurusnya (ketuanya), yang menyangkut aspek-aspek pengetahuan dan ketrampilan dari jenis-jenis kegiatan yang ditugaskannya. Untuk mendapatkan informasi yang disampaikan Ketua Pos KB Desa kepada masyarakat , maka harus dibekali cara-cara pendekatan analogi atau pendekatan-pendekatan melalui persamaan-persamaan yang ada di masyarakat. Pengertian KB Nasional dianalogikan dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, dan sebagainya. Hal tersebut diharapkan akan menambah wawasan Ketua Pos KB Desa dalam membina dan memotivasi masyarakat untuk ber Keluarga Berencana Nasional. Sehingga selanjutnya akan terjadi kemandirian masyarakat dalam ber KB. Kegiatan untuk membelajarkan Ketua Pos KB Desa dalam program KB Nasional, dan kegiatan untuk membelajarkan masyarakat dalam program KB Nasional yang dilaksanakan oleh Ketua Pos KB Desa. Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya serta sarana dan poten-

si yang ada dari Ketua Pos KB Desa maupun pada masyarakat sendiri.

B. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diskusi atau pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Ketua Pos KB Desa, sebagai petugas sukarela dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa. Sesuai dengan fungsinya telah berpartisipasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah dipercayakan kepadanya. Tugas-tugas yang dikerjakannya meliputi; kegiatan penerangan dan motivasi (66%), mengerjakan pembinaan peserta KB (60%), mengerjakan pembinaan Institusi Masyarakat (53%), mengikuti/melaksanakan Rapat Koordinasi KB Desa (61%), mengerjakan pendataan PUS dan peserta KB (65%), mengikuti Minilokakarya KB/Kes (61%), dan membantu kegiatan Posyandu (54%).
2. Ketua Pos KB Desa dalam mengerjakan jenis-jenis kegiatan tersebut, berdasarkan kebutuhannya di lapangan ternyata mempunyai urutan atau prioritas tertentu. Prioritas atau urutan tersebut adalah; (1) pembinaan peserta KB, (2) kegiatan mengikuti Minilokakarya KB/Kes, (3) kegiatan pembinaan Institusi Masyarakat, (4) kegiatan penerangan dan motivasi, (5) kegiatan pendataan PUS dan peserta KB, (6) mengikuti/melaksanakan Rapat Koordinasi KB Desa dan (7) membantu kegiatan Posyandu. Prioritas penggarapan ini adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah sendiri (BKKBN), mengingat

pencapaian peserta KB aktif (CU/PUS) sudah tinggi, yaitu diperlukan upaya pembinaan.

3. Jenis-jenis kegiatan yang dikerjakan Ketua Pos KB Desa ternyata jumlahnya bervariasi. Dari paling sedikit 2 kegiatan sampai dengan semua kegiatan (7 kegiatan). Bervariasinya mengerjakan jenis-jenis kegiatan tersebut, karena disesuaikan dengan tingkat kemauan dan kemampuannya serta kondisi daerahnya. Jumlah jenis kegiatan dikerjakan Ketua Pos KB Desa sebanyak 52% yang mengerjakan 5 kegiatan atau lebih. Dari 52% tersebut, ternyata yang memenuhi harapan hanya 21%. Dengan demikian dari 100 ketua Pos KB Desa yang berpartisipasi aktif, ternyata hanya 21% yang relatif lebih bermakna partisipasinya bila dibandingkan dengan yang lainnya.
4. Pada hakekatnya petugas KB (PLKB) untuk membina Ketua Pos KB Desa, adalah merupakan aplikasi Pendidikan Luar Sekolah. Dengan cara membelajarkannya dalam program KB Nasional. Berdasarkan beberapa kelemahan yang ditemukan dalam partisipasi Ketua Pos KB Desa, maka kegiatan belajarnya ditekankan kepada upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, tehnik penyuluhan dan motivasi (KIE), pengetahuan alat kontrasepsi, cara penanganan keluhan, pencatatan pelaporan, tehnik pembinaan, dan sebagainya. Untuk memperluas Sasarannya, seperti Generasi Muda, maka kegiatan belajarnya meliputi; pendewasaan usia perkawinan, keluarga bertanggung jawab, NKKBS, nilai sosial ekonomi budaya dan kependudukan. Semua kegiatan belajar ini diinteg-

- rasikan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya adalah motif berprestasi, komunikasi, dan status sosial ekonomi. Hubungannya signifikan, dengan masing-masing mempunyai hubungan positif yang mantap dan kuat. Terjadinya perubahan yang positif dari motif berprestasi, komunikasi, dan status sosial ekonomi maka akan diikuti oleh perubahan positif dari Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya.
 6. Pengaruh motif berprestasi terhadap Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional, ternyata hanya pada kegiatan pembinaan peserta KB, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak signifikan. Hal tersebut kemungkinan bahwa Ketua Pos KB Desa dalam mengerjakan tugasnya hanya mengerjakan tugas yang dianggap penting saja. Karena keterbatasan pengetahuan, atau mungkin kurang mendapat petunjuk petugas KB.
 7. Pengaruh komunikasi terhadap Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional, ternyata hanya pada kegiatan-kegiatan penerangan dan motivasi, dan pembinaan peserta KB. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya tidak signifikan. Hal tersebut diduga, karena penggunaan informasi saat ini hanya untuk kepentingan pembinaan dan penerangan saja, keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia, kurang memperoleh petunjuk dari petugas KB itu sendiri.

8. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugas program KB Nasional, ternyata dalam kegiatan penerangan dan motivasi, pembinaan peserta KB, dan mengikuti Minilokakarya KB/Kes. Sedangkan pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan lain, tidak signifikan. Tidak ada hubungannya karena, keterbatasan Ketua Pos KB Desa dalam mengerjakan tugasnya, terdapatnya Ketua Pos KB Desa yang masih menuntut upah/fasilitas dari pemerintah, keterpaksaan ikut berpartisipasi.

C. Implikasi Hasil Penelitian

Dengan menyadari keterbatasan hasil penelitian, baik lokasi, sasaran maupun analisisnya. Partisipasi Ketua Pos KB Desa yang terbatas pada kegiatan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam partisipasinya Ketua Pos KB Desa telah bertindak sebagai agen pembaru di desanya. Ternyata telah mengungkapkan sebagian dari teori Rogers dan Shoemaker (1981), yang mengatakan bahwa peranan agen pembaru, adalah; membangkitkan kebutuhan, mengadakan hubungan untuk perubahan, mendiagnosis masalah, menciptakan motivasi, merencanakan pembaruan, memelihara pembaruan, dan mencapai hubungan terminal. Ketua Pos KB Desa dalam kegiatannya telah melaksanakan penerangan dan motivasi, serta pembinaan terhadap peserta KB. Berarti bahwa Ketua Pos KB Desa tersebut hanya melaksanakan peran-peran, membangkitkan kebutuhan, menciptakan motivasi dan memelihara pembaruan.

Selanjutnya hasil penelitian ini mengungkapkam bahwa kegiatan atau partisipasi Ketua Pos KB Desa, da-

lam melaksanakan tugas program KB Nasional, dipengaruhi oleh motif berprestasi, komunikasi dan status sosial ekonomi. Terjadinya perubahan positif ke tiga variabel di atas maka akan diikuti perubahan positif oleh partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya. Terdapatnya partisipasi Ketua Pos KB Desa karena mempunyai motif berprestasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya, untuk mencapai hasil dengan sebaik-baiknya. Hasil penelitian McClelland 1961 (Zaenudin Arif; 1982) motif berprestasi tinggi ditemukan pada masyarakat golongan menengah. Hasil penelitian Lucy Emmawati (1989), bahwa terdapat hubungan antara komunikasi dan partisipasi, yaitu komunikasi dapat meningkatkan partisipasi. Semakin tinggi komunikasi/informasi, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasinya. Menurut Krech (1962 : 76-84), semakin tinggi pendidikan individu semakin berkembang kognisinya dan semakin sadar terhadap situasi di sekitarnya. Hasil penelitian mengenai hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya, tidak sejalan dengan hasil penelitian Lucy Emmawati (1989), yang mengatakan bahwa hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi sangat lemah hubungannya atau dapat diabaikan. Hal tersebut bisa terjadi karena sasaran penelitian dan obyek penelitian berbeda, sekalipun konteksnya partisipasi. Tetapi penelitian ini mengungkapkan terdapatnya hubungan status sosial ekonomi dengan partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini mendukung pendapat Keith Davis (1981), peranan seseorang di dalam kelom-

poknya ditentukan oleh keadaan status sosial ekonominya. Ini membuktikan perilaku seseorang dalam berpartisipasi maupun dalam berbagai kegiatan lainnya ditentukan oleh status sosial ekonominya. Selanjutnya Krech (1962 : 316), bahwa status sosial ekonomi akan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap perilaku individu, apabila variabel-variabel lain selain status sosial ekonomi seperti sikap, motif, sistem nilai, muncul secara serempak pada tingkat yang sama.

Implikasi praktis dari hasil penelitian, dengan telah ditemukannya partisipasi Ketua Pos KB Desa yang sekaligus merupakan agen pembaru di desanya, khususnya dalam program KB Nasional. Ditemukan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasinya, yaitu motif berprestasi, komunikasi, dan status sosial ekonomi. Sebagai agen pembaru yang belum berfungsi sepenuhnya, maka bari para pembuat kebijaksanaan, khususnya yang menangani pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan yang menangani pelembagaan dan pembudayaan (Pelembud). Dengan penemuan ini diharapkan menjadi landasan yang tepat untuk mempersiapkan, memilih dan membinanya lebih lanjut. Sehingga Ketua Pos KB Desa dapat berfungsi sebagai tenaga pengelola dan pelaksana program KB di desanya. Dengan ini pula, maka alih peran program kepada masyarakat akan lebih cepat.

Eksistensi Pos KB Desa sebagai wadah atau organisasi harus tetap dipertahankan dengan cara dibina dan

diarahkan untuk menuju kemandirian dalam mengelola program KB Nasional. Mempertahankan ini dengan cara membelajarkannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dari Ketua Pos KB Desa sendiri. Oleh karena itu kegiatan belajarnya meliputi ; pengetahuan dan ketrampilan, organisasi dan manajemen, serta keswadayaan dalam mengelola program KB Nasional tersebut. Di samping itu, bahwa sasaran hendaknya diperluas ke aspek-aspek yang mendukung program KB Nasional, seperti generasi muda, kaum bapak, dan institusi lain yang ada di masyarakat, seperti pengajian, pesantren, dan sebagainya.

Selanjutnya dengan keterbatasan penelitian ini, diharapkan kepada yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai partisipasi Ketua Pos KB Desa dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menyangkut :

- a. Apakah ada perbedaan antara Ketua Pos KB Desa yang berstatus istri Kepala Desa/Perangkat Desa dengan yang bukan istri Kepala/perangkat Desa.
- c. Sampai seberapa jauhkah tingkat kemandirian Ketua Pos KB Desa dalam mengelola program KB Nasional di di desanya.
- d. Bagaimana partisipasi lembaga-lembaga lain, seperti: Sub Pos KB Desa, Kelompok Akseptor, Posyandu, UPPKA, dalam mengelola program KB Nasional di daerah garapannya.

Demikianlah beberapa implikasi sehubungan dengan hasil penelitian ini, semoga ada manfaatnya.

